

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agensi Teori)

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (agent) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (principal). Zimmerman pada tahun 1997 menyatakan bahwa agency problem terjadi pada semua organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, agency problem terjadi antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor publik, agency problem terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai agent dan para pemilih (masyarakat) sebagai principal. Agency problem muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak agent secara moral bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agent juga berkepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Girsang, 2015). Menurut Meisser yang dikutip dari Girsang (2015), terdapat 2 permasalahan agensi yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. akuntabilitas publik adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Girsang, 2015). Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, salah satunya yaitu melalui kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan sekaligus pengungkapan dan penyajian laporan se wajar mungkin. Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan

principal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di Pemerintahan antara rakyat sebagai agent dan pemerintah sebagai principal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agent. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost. Dalam konsep pemberian informasi melalui internet kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan (Girsang, 2015).

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara garis besar pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah “kewajiban pengelola keuangan negara (Presiden - Menteri Keuangan - Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian - Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi LKPD masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah agar bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan dan tidak melakukan tindakan ilegal untuk kepentingan individu maupun kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi diperlukan untuk menjaga perekonomian efisien dan tumbuh secara berkelanjutan. Penting bagi setiap entitas, di sektor privat dan sektor publik untuk menjaga lebih akuntabel dan transparan dalam hal pelaporan keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Indra (2010) akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya (Angraini, 2016). Penilaian pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum bisa dilihat dari hasil dari laporan program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat bisa menilainya. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Rinaldi, 2016).

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas 16 kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut Sulistoni (2003) ciri – ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu :

- Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
- Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
- Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut Merialsa (2017) dilaksanakannya tiga komponen dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan yaitu :

a Integritas Keuangan.

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah.

b Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

c Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Menurut Madiasmo (2004) ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan- kebijakan yang diambil. Jadi akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara terhadap publik.

2.3 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Siahaan, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dibuat dengan tepat waktu. Selain itu, informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mempertegas atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi (Siahaan, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi pemerintah yang ditunjang dengan hukumnya yang jelas, akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Keterbukaan dan kemudahan suatu informasi penyelenggaran pemerintahan dalam memberikan pengaruh guna mewujudkan dari berbagai indikator, salah satunya adalah laporan pemerintah daerah.

Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek menurut Risnayanti (2020) yaitu :

1. Komunikasi publik oleh pemerintah, merupakan suatu kompleksitas pilihan pilihan yang dinyatakan oleh banyak orang yang berkaitan dengan sesuatu isu yang dipandang penting oleh umum;
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi, Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dalam segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Adapun dimensi transparansi yang telah dijelaskan Suparno (20012) yaitu:

- 1) Terdapat komunikasi publik oleh pemerintah berupa laporan keuangan mudah diakses dan terbukanya informasi mengenai proses.
- 2) Aksebilitas masyarakat terhadap transparansi dalam pembuatan alapran keuangan berpa sistem pemberian informasi kepada publik. Dan pada akhirnya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia perusahaan atau organisasi sebagai pengguna sistem perlu memiliki tingkat pengetahuan profesional yang memadai, atau setidaknya kemauan untuk terus belajar dan mengasah keterampilannya. Fokus utama sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi atau perusahaan. Untuk meningkatkan sumber daya manusia perusahaan perlu memperhatikan kualitas sumber dayanya, dalam hal ini kompetensi atau kualitas pegawai harus ditingkatkan guna mewujudkan pegawai yang berdaya saing lebih tinggi dan aktivitas sumber daya manusia yang dilakukan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.

Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang atau kemampuan sumber daya manusia yang memungkinkan mereka untuk melakukan kinerja luar biasa dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Definisi Kompetensi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah sebagai berikut : “Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan”. Suatu tingkat kompetensi diperlukan untuk memahami tingkat pekerjaan yang diharapkan pada kategori baik atau sedang. Penetapan ambang batas kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar untuk proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Wardani (2017) mengembangkan indikator terkait kompetensi sumber daya manusia, sebagai berikut:

1. Kemampuan individu dimaksudkan untuk menentukan apakah pegawai pemerintah dapat menyusun laporan keuangan.
2. Peran dan fungsi pencapaian tujuan yang bertujuan untuk memahami peran dan fungsi pegawai dalam pelaksanaan tanggung jawabnya di instansi.
3. Memahami prosedur dan proses akuntansi yang bertujuan untuk memahami ada tidaknya pedoman prosedur dan proses akuntansi.
4. Pelatihan berkala bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pelatihan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian

pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu (Monica, 2011). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain (Nordiawan, 2012). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan menjadi alokasi sumber daya. Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010:

A. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dibuat dengan tepat waktu. Selain itu, informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mempertegas atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

B. Andal

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan terhindar dari kesalahan yang material, bersifat netral dan menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi.

C. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan milik entitas lain yang sejenis.

D. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk maupun istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna agar pengguna dapat mempelajari informasi yang di maksud secara mudah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu

No	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Nina Rosalin Siahaan(2018)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, variabel transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Nabila Zubaidi (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sdm berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kantor pendidikan dan kebudayaan situbondo dan biro layanan informasi dan komunikasi. pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan di kantor pendidikan dan kebudayaan situbondo dan biro layanan informasi dan komunikasi.

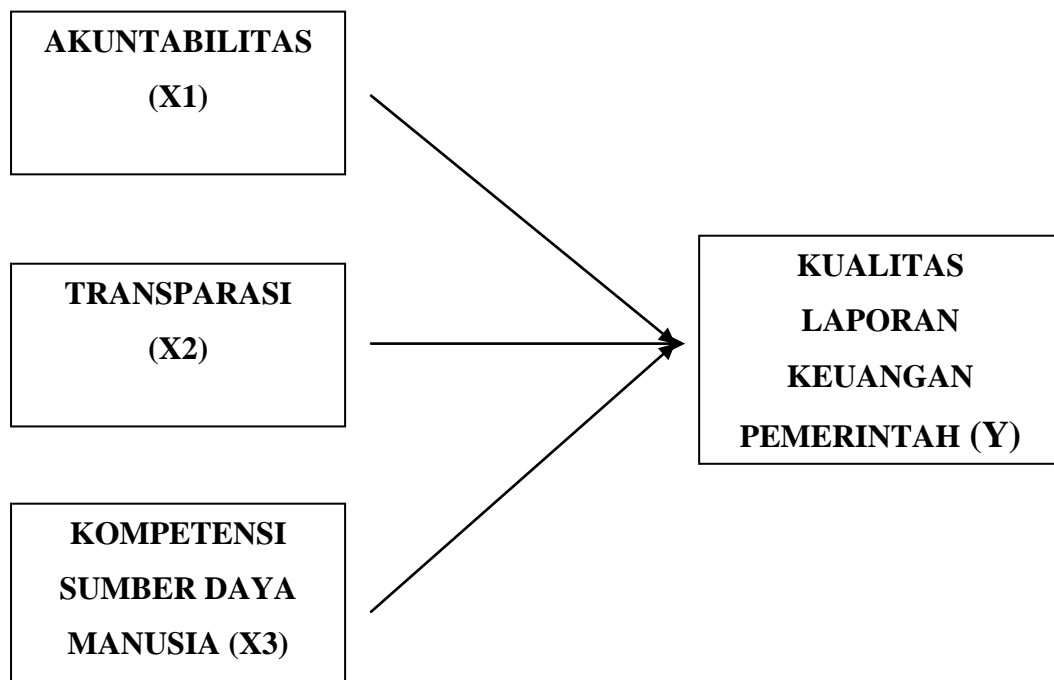
3	Maria Susanti Liu (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal berpengaruh signifikan positif kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul.
4	Ni Kadek Gino Melinda dan Putu Cita Ayu (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Lembaga Pengkreditan Desa Se-Kecamatan Gianyar	Kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan pemahaman akuntansi berbasis akruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga pengkreditan desa se Kecamatan Gianyar.
5	Andita Cahyasari Pradana Putri (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Transparansi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas

			laporan keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu dari topik yang relevan dengan penelitian ini terdapat persamaan pada variabel dependen (Y) yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan referensi penggunaan Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen (X). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Metro.

2.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan yang diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran Widodo (2011). Pelaku kebijakan publik dalam hal ini adalah instansi pemerintah harus dapat bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan sepak terjangnya kepada publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan.

Disebutkan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di Pemerintah (Halim 2012). Akuntabilitas sudah menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah, serta adanya keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan.

Menurut penelitian Nina (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian adalah :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan

keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah (Arifin Tahir, 2011).

Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga ada interaksi masyarakat dalam mengawasi serta menilai program-program pemerintah yang sudah atau belum terealisasi serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik

Menurut Maria (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam memberikan informasi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kepada publik. Dari uraian di atas, maka hipotesis yang di bangun adalah sebagai berikut :

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan salah satu yang dihasilkan oleh sumber daya manusia alam bidang akuntansi. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian entitas terkait. Agar dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam membuat laporan keuangan. Teori sumber daya menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keunggulan kompetitif. Maka dari itu teori tersebut dapat dijadikan menjadi dasar dari kompetensi sumber daya manusia dalam menyajikan laporan keuangan.

Menurut Nabila Zubaidi (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang ada maka laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin berkualitas karena waktu pembuatan laporan keuangan tersebut dapat efisien, efektif dan ekonomis. Dari uraian di atas maka hipotesis yang di bangun adalah berikut ini :

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.